

# **ANALISIS KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

## **KOCE LILINE**

Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat

[johanaliline@gmail.com](mailto:johanaliline@gmail.com)

## **ELAKE NATANIEL**

Program Studi Administrasi Publik  
Pasca Sarjana Universitas Pattimura Ambon

[natanielelake@gmail.com](mailto:natanielelake@gmail.com)

## **MIKE J. ROLOBESSY**

Program Studi Administrasi Publik  
Pasca Sarjana Universitas Pattimura Ambon

[mikeyurnida@gmail.com](mailto:mikeyurnida@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the performance of the Governance and Regional Cooperation Section of West Seram Regency. The analysis focuses on the effectiveness and efficiency of the section's implementation of its duties and functions in supporting the achievement of regional government goals. This study uses a quantitative, qualitative, or mixed approach, collecting data through interviews, document studies, observations, and questionnaires. The study is expected to provide a comprehensive overview of the section's performance and provide recommendations for future performance improvement. The results of this study indicate that the performance of the Governance and Regional Cooperation Section of the West Seram Regency Regional Secretariat is not optimal due to the lack of implementation of several programs.*

**Keywords:** *Performance, Regional Cooperation.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kinerja Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Analisis difokuskan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi bagian tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran, dengan mengumpulkan data melalui. Teknik Pengumpulan Data dengan wawancara, studi dokumen, observasi, dan angket. Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja bagian tersebut dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja bagian pemerintahan dan kerjasama sekretariat daerah

Kabupaten Seram bagian barat belum maksimal sebagai akibat dari masih kurangnya beberapa program yang belum dilaksanakan

**Kata kunci :** Kinerja, Kerjasama Daerah

## PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah memegang peranan krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sangat bergantung pada kualitas kinerja untuk melakukan fungsi dan tugasnya dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, analisis kinerja pemerintahan daerah menjadi amat penting sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui indikator kinerja utama yang terukur dan terarah, analisis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan. indikator ini harus relevan dengan visi dan misi daerah, serta

disesuaikan dengan kondisi dan konteks setempat.

Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan: Analisis kinerja dapat mengungkap kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari segi program, kebijakan, maupun sumber daya. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, data ini sangat penting.

Selanjutnya analisis kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan pengambilan Keputusan, berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari analisis kinerja dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, efektif, dan efisien. Keputusan yang diambil dapat lebih berorientasi pada

hasil dan berdampak positif bagi masyarakat.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Dengan melakukan analisis kinerja secara terbuka dan transparan, pemerintah daerah menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Hal ini memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas Analisis kinerja memungkinkan identifikasi program dan kegiatan yang tidak efektif atau tidak efisien. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya (anggaran, SDM, dan lainnya) secara lebih tepat sasaran dan optimal.

Analisis kinerja bukan hanya untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai, tetapi juga untuk belajar dari

pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan. Proses ini mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Bagian umum dan kerjasama merupakan jantung operasional dari organisasi pemerintah daerah. Bagian ini bertanggung jawab atas administrasi, koordinasi, dan hubungan eksternal yang secara langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi seluruh organisasi pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat.

Menurut Peraturan Daerah Seram Bagian Barat No.9 tahun 2023, bagian tata pemerintahan dan kerjasama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, melaksanakan

tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan pemerintahan. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama memiliki enam fungsi terkait dengan tugas pokok tersebut. Fungsi-fungsi tersebut meliputi persiapan dokumen untuk perumusan kebijakan daerah, persiapan dokumen untuk pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, persiapan dokumen untuk pelaksanaan tugas perangkat daerah, persiapan dokumen untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, persiapan dokumen untuk pembinaan administrasi, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Bagian tata pemerintahan dan kerjasama membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana harus dapat memenuhi kebutuhan.

Dalam pengamatan awal, peneliti menemukan beberapa masalah yang bisa diidentifikasi pada bagian tata pemerintahan dan kerjasama sebagai berikut :

1. Faktor Individu (Aparatur)
  - a. Rendahnya motivasi pegawai untuk bekerja
  - b. Kurangnya disiplin pegawai antara lain : tidak taat jam masuk dan pulang kantor dan yang malas masuk kantor dalam jangka waktu yang lama (1-2 bulan)

- c. SDM belum memadai, misalnya ada yang belum bisa mengoperasikan komputer
  - b. Ruangan, meja dan kursi untuk pegawai belum lengkap.
- Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah:
- 2. Faktor Organisasi
    - a. Pembagian kerja tidak merata sesuai dengan Tupoksi masing masing bagian dan sub bagian maupun pelaksana
    - b. Sistem reward kepada ASN yang rajin dan berprestasi dianggap tidak adil oleh sebagian pegawai dan punishment kepada ASN yang malas maupun tidak berprestasi
    - c. Rendahnya kualitas SDM
  - 3. Sarana dan Prasarana
    - a. Kurangnya sarana pendukung seperti Komputer, Laptop, dan Kendaraan bermotor
- 1. Bagaimana efisiensi dan efektivitas bagian tata pemerintahan dan kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
  - 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja.
  - 3. Bagaimana implikasi kinerja terhadap bagian tata pemerintahan dan kerjasama.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Administrasi Publik**

Teori Post-NPM / *New Public Governance* (NPG) – Stephen Osborne merupakan respons terhadap kelemahan NPM, dengan menekankan pada kolaborasi, *co-*

*production* (produksi bersama layanan), dan nilai-nilai publik. Teori ini lebih menekankan aspek sosial dan relasional daripada hanya efisiensi.

Ciri utama:

- a. Pemerintah sebagai fasilitator, bukan semata manajer.
- b. Pelibatan masyarakat dalam desain dan penyampaian layanan.
- c. Nilai bersama (*public value*) sebagai tujuan utama (Osborne, S.P. 2006)

Teori *Public Value* – *Mark Moore*, mengembangkan ide bahwa administrasi publik harus fokus menciptakan nilai publik, bukan hanya efisiensi dan hasil jangka pendek. Peran utama manajer publik adalah sebagai "entrepreneur publik" yang harus menyeimbangkan

legitimasi politik, kemampuan operasional, dan keinginan publik.

Ciri utama:

- a. Fokus pada penciptaan nilai publik (*public value*).
- b. Peran strategis manajer publik.
- c. Kolaborasi antara negara dan masyarakat (Moore, M.H. 1995)

### **Teori Pemerintahan**

Teori *Neo-Institusionalisme* – *Douglass C. North*, berpendapat bahwa lembaga-lembaga pemerintahan dan aturan-aturan formal serta informal sangat menentukan bagaimana suatu negara berkembang. Pemerintahan yang efektif harus dibangun di atas institusi yang kuat dan dapat dipercaya. (North, D.C., 1990).

### **Kinerja Pemerintahan**

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) kinerja pemerintahan adalah keluaran atau hasil dari kegiatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, yang dapat diukur dari aspek input, proses, output, dan outcome. Mahsun (2006) menyatakan kinerja adalah ukuran tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi.

Tjiptono dan Chandra (2005) menyatakan kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan strategis dikenal sebagai kinerja organisasi. Moheriono (2012) menyatakan kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab

mereka untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika.

Menurut Dwiyanto (2006) kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara efisien, efektif, dan akuntabel dikenal sebagai kinerja pemerintahan.

Menurut Mahmudi (2005) kinerja pemerintahan diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi publik, termasuk kualitas layanan publik dan tingkat kepuasan Masyarakat. Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa kinerja pemerintahan didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh aparat

pemerintah dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka.

Kinerja pemerintahan, menurut Moehariono, didefinisikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan organisasi publik yang telah ditetapkan. (Moehariono, 2012). Harry P. Hatry (2006) menegaskan bahwa kinerja pemerintahan diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif, seperti produktivitas, kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dan dampak program terhadap kehidupan warga. Kettunen (2010) menyatakan bahwa kinerja pemerintahan dapat dinilai dari kapasitas institusi publik dalam memberikan pelayanan, menjaga legitimasi politik, serta meningkatkan kualitas hidup

masyarakat melalui kebijakan yang tepat.

### **Tata Pemerintahan**

Menurut Dwiyanto (2006) cara pemerintah menjalankan kekuasaan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat dikenal sebagai tata pemerintahan. Ini mencakup proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor.

Kooiman (2003) menyatakan tata pemerintahan adalah suatu pola interaksi kompleks antara aktor-aktor negara, masyarakat sipil, dan pasar, di mana peran pemerintah tidak lagi dominan, tetapi menjadi fasilitator dalam mengelola masyarakat. Menurut Hyden, Court & Mease (2004) tata pemerintahan mencerminkan sejauh mana warga negara dapat menyuarakan pendapat,

memilih pemimpinnya, serta seberapa baik institusi pemerintah bertanggung jawab dalam menggunakan wewenang untuk kebaikan publik.

### **Kerjasama Pemerintah**

Menurut Dwiyanto (2006) salah satu bagian dari tata kelola pemerintahan adalah kerjasama antar pemerintah, yang melibatkan berbagai aktor, baik vertikal maupun horizontal, untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. Agranoff dan McGuire (2003) menyatakan kerjasama dalam pemerintahan sangat penting dalam menciptakan model pemerintahan yang efisien, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Hal ini mencakup kemitraan antara berbagai entitas pemerintah dan sektor lainnya.

Lembaga Administrasi Negara (2008) menyatakan bahwa kerjasama antar pemerintah merupakan bagian dari manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antar instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan.

Bingham, Nabatchi dan O'Leary (2005) menyatakan kerjasama antar pemerintah merupakan bentuk dari collaborative governance, yaitu proses di mana aktor-aktor dari berbagai lembaga pemerintah bekerja bersama secara formal maupun informal untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan publik.

Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) menyatakan kerjasama pemerintah terjadi dalam

kerangka *collaborative governance regime*, yakni suatu sistem dinamis yang memungkinkan pemerintah dan aktor lainnya bekerja sama melalui struktur kelembagaan, norma bersama, dan proses dialogis.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan tujuan untuk menganalisis kinerja tata pemerintahan dan kerjasama Kabupaten Seram Bagian Barat. Informasi selengkap-lengkapnyanya yang relevan dengan tujuan penelitian disebut informan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan informasi penting dari informan, yang mencakup:

1. Kepala Bagian tata pemerintahan dan kerjasama (1 orang)
2. Kepala Sub-Bagian (4 orang)

3. Pegawai Pelaksana (4 orang)
4. Kepala Desah dan Kelurahan (8 orang)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

### a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada subjek penelitian yang berkaitan dengan kinerja bagian tata pemerintahan dan kerjasama di Kabupaten Seram Bagian Barat.

### b. Wawancara

Dilakukan wawancara untuk mengetahui lebih banyak tentang kinerja bagian tata pemerintahan dan kerjasama

Kabupaten Seram Bagian Barat.

c. Dokumentasi

Data dari laporan dan keterangan tertulis, tergambar, terekam, atau tercetak, serta dokumen dan foto digunakan untuk mendapatkan data tertulis tentang kinerja bagian tata pemerintahan dan kerjasama Kabupaten Seram Bagian Barat.

Analisis data deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan kinerja bagian tata pemerintahan dan kerjasama kabupaten Seram Bagian Barat. Analisis data dapat dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu:

1. Reduksi data

Selama penelitian dan setelah penelitian lapangan hingga penyusunan laporan akhir,

pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data adalah proses yang dikenal sebagai reduksi data. Reduksi data adalah jenis analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang elemen yang tidak perlu dari data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Penyajian data

Data penyajian harus disusun secara sederhana dari informasi yang kompleks ke dalam bentuk analisis yang mudah dipahami, karena penyajian adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan..

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian. Data yang disusun dihubungkan dan dibandingkan antara satu sama lain, sehingga mudah untuk menarik kesimpulan sebagai cara untuk menyelesaikan setiap masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas

Kinerja pemerintahan adalah tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan fungsi, tugas, serta kewenangan yang telah

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kinerja pemerintahan dapat dipahami sebagai ukuran efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi negara, pelayanan publik, serta implementasi kebijakan publik. Kinerja ini biasanya diukur dari seberapa jauh pemerintah:

1. Efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Efisien dalam menggunakan sumber daya (anggaran, tenaga, waktu).
3. Responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Akuntabel terhadap proses dan hasil yang dicapai.

5. Transparan dalam misalnya pada kegiatan kerjasama pengelolaan pemerintahan. daerah yang selama tahun 2024-2025

Untuk mengetahui sejauh mana Kinerja pada bagian umum dan kerjasama sekretariat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat diperoleh melalui data sekunder dan data primer dari informan diantaranya:

Hasil wawancara dengan kepala Bagian, menjelaskan bahwa “Dalam satu tahun anggaran bagian pemerintahan dan kerjasama telah menyelesaikan 4 kegiatan yang terdiri dari penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LAKIP), penyusunan laporan SPM, fasilitasi kerjasama daerah, evaluasi kinerja kecamatan”

Dari informasi di atas menunjukkan bahwa ada kegiatan yang ternyata belum bisa diwujudkan atau belum ada hasil yang maksimal,

misalnya pada kegiatan kerjasama daerah yang selama tahun 2024-2025 belum ada kerjasama sebagaimana yang tergambar dalam LAKIP. Walaupun dalam laporan disampaikan bahwa semua kegiatan itu tepat waktu.

Salah satu tugas dan fungsi bagian pemerintahan dan kerjasama adalah memfasilitasi koordinasi dengan aparat keamanan terhadap tugas dan fungsi ini dari hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa sampai sekarang belum ada kerjasama dengan instansi keamanan. Informasi yang diperoleh dari kepala bagian pemerintahan menjelaskan bahwa “Sampai dengan hari ini belum ada koordinasi dengan aparat keamanan karena hal hal menyangkut keamanan yang mewakili

pemerintahan daerah adalah Satpol PP.”

Pertanyaan tentang kegiatan pembinaan kepada Aparatur Desa oleh informan dikatakan bahwa tidak ada pembinaan yang dilakukan kepada Aparatur Desa karena kegiatan itu dilaksanakan oleh Dinas Pemerintahan Desa. Untuk mengetahui apakah ada kerjasama yang ditandatangani daerah lain terhadap pertanyaan ini oleh informan yang adalah salah satu staff pada bagian pemerintahan dan kerjasama menjelaskan bahwa ada kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Dari Informasi itu dapat digambarkan bahwa informan belum memahami maksud dari kerjasama antar daerah itu bukan dengan provinsi, mestinya kerjasama dengan Kabupaten atau Kota baik dalam Provinsi maupun di luar

Provinsi. Setelah dijelaskan kepada informan, ternyata belum ada kerjasama dengan daerah lain seperti apa yang dimaksudkan dengan penandatanganan dengan daerah lain.

Bagian Pemerintahan dan kerjasama Sekretariat Kabupaten Seram Bagian Barat ternyata belum ada kerjasama luar negeri, informasi ini diperoleh dari salah satu staf. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja bagian pemerintahan dan kerjasama sekretariat kabupaten seram bagian barat apakah mereka puas, maka diperoleh beberapa informasi bahwa masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang diberikan dari Pegawai pada bagian pemerintahan terkait dengan urusan urusan kami di Bagian Pemerintahan. Namun sebagian masyarakat menyatakan: “cukup bagus pelayanan

yang diberikan, namun perlu diakui kadang-kadang harus menunggu pegawai karena pegawai yang mau ditemui tidak berada ditempat sehingga harus menunggu cukup lama” (OE).

“Beta puas, mar skali-skali dong suka bamarah (Saya puas, hanya saja terkadang mereka gampang marah)” (ZE)

Dari informasi yang diperoleh dari masyarakat diatas menunjukkan bahwa mereka puas, dengan pelayanan yang diberikan oleh bagian pemerintahan dan kerjasama sekretariat Kabupaten Seram Bagian Barat, walaupun ada yang merasa kurang menyenangkan, namun umumnya mereka puas.

Sejauhmana penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan adminstrasi pemerintahan oleh salah satu staf sebagai informan menjelaskan: “Teknologi

yang sudah digunakan disini masih terbatas karena jaringan internet yang belum memadai, kadang terganggu dan tidak berfungsi.” (AP)

Dari informansi yang diperoleh terhadap kinerja bagian pemerintahan dan kerjasama pada sekretariat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Penjelasan informan di atas diperoleh gambaran bahwa, tujuan yang ditetapkan dari setiap program dan kegiatan sydag tercapai namun belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas penunjang misalnya karena kurangnya fasilitas yang menunjang dan belum adanya komitmen dari pegawai terhadap kontrak kerja yang dibuat

## **Faktor Pendukung dan Penghambat**

### **1. Faktor Pendukung**

a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

- 1) Aparatur yang profesional, memahami regulasi, memiliki kemampuan manajerial dan komunikasi

Terkait dengan faktor pendukung ini Informasi yang diperoleh dari staf bagian pemerintahan dan kerjasama sekretariat kabupaten Seram Barat menginformasikan bahwa:

“Sumber daya Manusia yang ditempatkan dalam tugas dan jabatan belum memadai karena ada pegawai yang belum memahami regulasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya” (WA)

Informan (SL) Mengatakan bahwa : “Ketersediaan pegawai sudah cukup namun kemampuan memahami tugas dari beberapa pegawai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.”

- 2) Pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur

Jawaban yang diperoleh maupun yang diamati oleh penulis belum ada pelatihan untuk peningkatan kapasitas operator, faktor ini yang sering menjadi kendala dalam kinerja pegawai.

b. Kebijakan dan Regulasi yang Jelas

- 1) Adanya peraturan yang tegas, mudah dipahami, dan mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan serta kerjasama daerah.

Terhadap faktor ini Peneliti menanyakan apakah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sudah sesuai atau berdasarkan pada aturan/regulasi (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan bupati). Diperoleh informasi baik dari Kepala bagian, Kepala sub-bagian pada bagian pemerintahan dan kerjasama bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sudah sesuai dengan peraturan atau/regulasi, misalnya dalam penjabaran tugas dan fungsi, maka para pegawai patut melaksanakan sesuai tupoksinya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang organisasi

seperangkat daerah maupun peraturan daerah tentang penjabaran tugas dan fungsi.”

2) Sinkronisasi aturan pusat dan daerah.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh bagian umum dan kerjasama selalu sinkron dengan kebijakan Bupati maupun aturan/regulasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dari Pemerintah Provinsi/ Pemerintah pusat.

c. Koordinasi dan Kolaborasi yang Baik

1) Kerjasama antarbagian di internal pemerintah daerah

Sebagaimana penjelasan dari Informan bahwa bagian Pemerintahan umum dan kerjasama selalu berkoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah

di Kabupaten Seram Bagian Barat yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bagian Pemerintahan dan Kerjasama.

- 2) Sinergi dengan instansi lain, baik pemerintah pusat, daerah lain, maupun mitra swasta dan masyarakat.

Terkait dengan faktor ini, bagian Pemerintahan dan Kerjasama sudah melakukan kerjasama koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah misalnya dengan POLRES Seram Bagian Barat dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan/program bagian pemerintahan dan kerjasama akan selalu melakukan

koordinasi dengan instansi lain jika diperlukan.

#### d. Sarana dan Prasarana

Dukungan fasilitas teknologi informasi, arsip, ruang kerja yang memadai, serta sistem administrasi modern. Faktor-faktor ini sesuai dengan data yang diperoleh menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi belum tersedia, lalu terkait dengan pernyataan arsip sudah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan ruang kerja dirasa belum memadai karena ruangan yang terbatas, dan menyangkut sistem kerja administrasi yang modern belum dapat diterapkan akibat dari tidak tersedianya infrastruktur.

#### e. Dukungan Anggaran

Pembiayaan yang cukup untuk program-program kerja, termasuk kegiatan kerjasama daerah maupun pelayanan pemerintahan. Dari hasil wawancara dengan informan yang adalah pejabat di bagian Pemerintahan dan Kerjasama menerangkan bahwa anggaran yang tersedia sangat tidak memadai atau belum cukup untuk membiayai program dan kegiatan.

f. Sistem Informasi dan Teknologi

1) Pemanfaatan digitalisasi untuk pelayanan, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi. Menyangkut dengan faktor ini, Penulis menanyakan pada Kepala bagian Pemerintahan dan Kerjasama apakah sudah menerapkan sistem administrasi digital untuk

pelayanan, dokumentasi, monitoring dan evaluasi. Jawaban yang diperoleh bahwa sampai saat ini belum diterapkan sistem informasi digital, namun demikian kedepan jika tersedia anggaran, biaya maka akan diusahakan melakukan digitalisasi dalam pelayanan administrasi.

2) Sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi

Faktor ini diakui bahwa semua kegiatan pelayanan pemerintahan dilaksanakan secara terintegrasi, artinya seluruh kegiatan pemerintahan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi pada sekretariat daerah.

g. Kepemimpinan dan Komitmen  
Pimpinan

Arahan, motivasi, dan konsistensi pimpinan dalam mendukung kinerja bagian tata pemerintahan.

Dari hasil wawancara yang berhubungan dengan faktor ini diperoleh informasi :  
“Bupati memiliki konsepsi terhadap masalah-masalah yang terjadi di daerah serta terus berinovasi dengan pihak-pihak lain untuk kemajuan daerah melalui pelaksanaan kerjasama daerah” (Kepala Bagian)

h. Partisipasi Masyarakat

1) Dukungan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas kegiatan atas arahan

pimpinan maka selalu melibatkan masyarakat/stakeholder secara partisipatif dan selalu berhasil dalam melaksanakan pelayanan kerjasama.

2) Transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam melaksanakan pelayanan maka faktor yang paling penting di era modern sekarang ini dibutuhkan komitmen untuk selalu transparan dan akuntabilitas untuk kepentingan masyarakat, dan sesuai arahan Bupati untuk selalu menerapkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan transparan.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam mewujudkan kinerja yang optimal telah dilakukan penelitian ditemukan ada beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan dari program. Masih banyak program/kegiatan yang terpaksa tidak dilaksanakan secara optimal sebagai akibat kurangnya ketersediaan dana didalam batang tubuh APBD.
- b. Fasilitas penunjang kegiatan yang tidak memadai, misalnya; mebeler untuk pegawai yang tidak memadai, misalnya meja kursi pimpinan yang tidak sesuai dengan jabatan, komputerisasi yang masih

kurang, dan fasilitas uang kantor juga tidak mendukung.

## Pembahasan

### 1. Efektivitas Kinerja

Berdasarkan data dan informasi serta pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan terukur yang sesuai dengan analisis, maka diperoleh data bahwa kinerja pada bagian pemerintahan dan kerjasama sekretariat kabupaten Seram Bagian Barat masih terdapat permasalahan, namun masih bisa diatasi. Ketersediaan anggaran sangat tidak memadai untuk membiayai kegiatan dan program, walau demikian dengan keterbatasan anggaran tapi dengan menerapkan prinsip efisiensi sehingga program bisa dilaksanakan dan tercapai walaupun belum optimal.

Kemudian dalam melayani masyarakat bagian pemerintahan dan kerjasama selalu bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, begitupun dalam setiap kegiatan pimpinan selalu responsif dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui dialog atau sosialisasi. Selain itu data menunjukkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas terhadap setiap proses dan hasil, juga selalu transparan dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut diatas berpengaruh pula terhadap efektivitas kinerja, walaupun sesuai tabel diatas semua laporan kinerja itu mencapai target 100% namun seyogianya aspek

efektivitas pelayanan tidak efektif. Hal itu bisa terjadi karena banyak-banyak tugas dan fungsi yang belum dilaksanakan sampai saat dilakukan penelitian ini.

## **2. Implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Dari data yang ada dapat dikatakan bahwa kinerja sudah optimal karena proses administrasi pemerintahan sudah tertib dan urusan pemerintahan umum seperti pelaporan wilayah pembinaan kecamatan koordinasi antar perangkat daerah, berjalan cukup efektif. Walaupun dalam kegiatan hubungan antar lembaga belum cukup maksimal.

## **3. Implikasi terhadap kualitas pelayanan publik**

Kinerja bagian tata pemerintahan bagian tata

pemerintahan dan kerjasama cukup baik dan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan perangkat daerah terhadap birokrasi pemerintah. Proses surat menyurat rekomendasi atau fasilitasi administrasi sangat cepat dan transparan.

#### **4. Implikasi terhadap kelola dan reformasi birokrasi**

Secara umum kinerja bagian pemerintahan tata pemerintahan dan kerjasama cukup baik dalam mendukung terwujudnya good governance khususnya dalam aspek-aspek akuntabilitas, efektivitas dan koordinasi antar lembaga

#### **5. Implikasi terhadap perencanaan dan kebijakan publik**

Proses perencanaan dan kebijakan sudah terlaksana

dengan baik dan keputusan di tingkat daerah berbasis data dan koordinasi yang kuat dengan demikian kinerja yang baik berimplikasi terhadap perencanaan dan kebijakan public. Berdasarkan penjelasan di atas maka dengan demikian kinerja bagian tata pemerintahan dan kerjasama SETDA Seram Bagian Barat memiliki implikasi strategis terhadap efektivitas administrasi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu Peningkatan kinerja tidak hanya berdampak pada proses internal birokrasi, tetapi juga pada tingkat kepuasan masyarakat serta legitimasi pemerintah daerah di mata publik.

### **KESIMPULAN**

Kinerja bagian pemerintahan dan kerjasama sekretariat daerah Kabupaten Seram bagian barat belum maksimal sebagai akibat dari masih kurangnya beberapa program yang belum dilaksanakan seperti kegiatan memfasilitasi koordinasi dengan aparat keamanan, kemudian tidak dilaksanakannya program pembinaan pada aparatur desa dan tidak ada kerjasama luar negeri padahal kegiatan-kegiatan tersebut merupakan tugas dan fungsi dari bagian tata pemerintahan.

Faktor pendukung Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerjasama Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu: Bupati Kabupaten Seram bagian barat sangat koncern terhadap masalah-masalah yang terjadi di daerah serta terus berinovasi dengan pihak-pihak

lain untuk kemajuan daerah melalui perluasan kerjasama daerah.

Faktor penghambatnya bagi kinerja bagian pemerintahan dan kerjasama adalah anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai semua program dan kegiatan. Kemudian Faktor yang lain adalah kurangnya fasilitas berupa :

1. Sarana dan prasana kantor (meja kursi)
2. Komputer
3. Ruangan kantor
4. Kendaraan dinas
5. Digitalisasi Administrasi

Dalam meningkatkan kinerja maka adanya komitmen dari pegawai/pejabat untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan sesuai dengan fakta integritas yang dibuat. Perlu diperjuangkan agar alokasi anggaran ditingkatkan untuk bisa membiayai seluruh program dan kegiatan, justru

itu pimpinan harus menjelaskan pentingnya kegiatan dan program itu kepada pimpinan untuk diperjuangkan dalam batang tubuh APBD. Agar kinerja meningkat maka pimpinan perlu memperjuangkan untuk tersedianya fasilitas kantor berupa ruangan, meja kursi, komputer, dan lain lain yang memadai dengan jabatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Bingham, L. B., Nabatchi, T., & O'Leary, R. 2005. The New Governance: Practices and Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government. *Public Administration Review*, 65(5), 547–558.
- Bovaird, T., & Löffler, E. 2003. *Public Management and Governance*. London: Routledge.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. 2003. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe.
- Dian, W. P. 2021. *Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Dwiyanto, A. 2006, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Hyden, G., Court, J., & Mease, K. 2004. *Making Sense of Governance: Empirical Evidence from Sixteen Developing Countries*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Kooiman, J. 2003. *Governing as Governance*. London: Sage Publications.

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). (2003). *Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 2008. *Pedoman Umum Hubungan Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat*. Jakarta: LAN RI.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Moehariono. 2012. *Indikator Kinerja Individu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Osborne, S. P. 2006. The New Public Governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387.
- Restu, B. T. 2021. *Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Studi terhadap Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Perguruan Tinggi)*, Tesis, Universitas Padjadjaran.
- Ricardo, R., & Wade, D. 2001. *Corporate Performance Management: How to Build a Better Organization Through Measurement Driven Strategies*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Robbins, S. P. 2001. *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Titin, A. 2013. *Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Penyelenggaraan Administrasi, Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan*, Skripsi, Universitas Terbuka.
- Tjiptono, F., & Chandra, G. 2005. *Service, Quality, and Satisfaction*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tongasa, K. S. 2007. *Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe: Studi Kasus pada Bagian Pemerintahan Umum*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Wati, D. A. F. 2013. *Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.